

**SAMBUTAN WAKIL PRESIDEN RI
PADA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH XXV**

Jakarta, 26 April 2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati,

- Para Pimpinan Lembaga Negara
- Para Menteri/Kepala Lembaga
- Para Gubernur seluruh Indonesia
- Para Bupati dan Walikota seluruh Indonesia
- Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten dan Ketua DPRD Kota seluruh Indonesia
- Anggota Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten dan Kota

- Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga kita dapat bertemu dalam peringatan HUT ke 25 Otonomi Daerah.

- Adapun tema tahun ini sangat tepat, inspiratif dan kontekstual, yaitu: *“Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19, untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit, dan Indonesia Maju”*.

Hadirin yang berbahagia,

- Saya ingin memulai sambutan ini dengan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, para Kepala Daerah, perangkat daerah, penyelenggara Pilkada, dan masyarakat, atas kontribusinya dalam keberhasilan pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 di 270 Daerah, dengan tingkat partisipasi 76,09%. Secara keseluruhan Pilkada telah berjalan dengan aman, lancar, tertib dan terkendali walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19.
- Keberhasilan tersebut menjadi suatu bukti bahwa melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang ketat, maka roda pemerintahan tetap berjalan dan produktif. Sehingga Pilkada yang merupakan agenda utama pembangunan demokrasi dan mandat Konstitusi, tetap dapat dilaksanakan sesuai rencana.

- Saya juga menilai Peringatan Hari Otonomi Daerah saat ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk melihat kembali dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
- Secara filosofis, kebijakan otonomi daerah dimaknai sebagai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dengan memindahkan lokus pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai pemberian kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur urusan-urusan tertentu secara mandiri.
- Penyelenggaraan otonomi daerah juga merupakan bentuk pengakuan Pemerintah Pusat terhadap kemandirian Daerah guna mendekatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Melalui kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan menyelenggarakan Pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

- Namun Pelaksanaan otonomi daerah yang berkualitas membutuhkan Kepemimpinan Adaptif. Pemimpin yang mampu menghadapi berbagai situasi, cepat dan tepat dalam bertindak, dan berorientasi pada pemecahan masalah dengan selalu menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan keadaan baru.

Hadirin yang berbahagia,

- Beberapa referensi indikator nasional dan internasional dapat kita cermati untuk melihat kinerja perjalanan otonomi daerah selama kurun waktu 25 tahun ini:

Pertama, **Laporan Indeks Demokrasi Dunia** yang dirilis oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dengan lima indikator yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil. Pada tahun 2019 dan 2020 Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3. Posisi Indonesia di lingkungan Asia Tenggara berada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.

Kedua, **laporan *Human Development Index*** (HDI) yang dirilis oleh program pembangunan PBB (UNDP) dengan tiga indikator yaitu harapan hidup, pendidikan,

dan perekonomian. Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat 107 dengan skor 71,8 atau tumbuh sekitar 0,03% dibandingkan capaian tahun 2019. Posisi Indonesia masih dibawah Malaysia dan Thailand.

Ketiga, **Indeks Persepsi Korupsi** yang dirilis oleh *Transparency International*. Tahun 2020 Indonesia berada pada peringkat 102 dengan skor 37, turun dari capaian tahun 2019 yang berada pada peringkat 85 dengan skor 40. Posisi Indonesia berada dibawah Singapura (peringkat 3 dengan skor 85), Brunei (peringkat 35 dengan skor 60) dan Malaysia (peringkat 57 dengan skor 51).

Keempat, **Ease of Doing Business** yang dirilis oleh *World Bank*, dengan empat belas indikator. Tahun 2020 Indonesia termasuk dalam klasifikasi *Easy* (mudah berusaha), namun masih dibawah Malaysia, Singapura dan Thailand dengan klasifikasi *very easy*.

- Mengacu pada keempat rujukan indikator tersebut diatas, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren atau yang kewenangannya dibagi antara pusat dan daerah, khususnya pada sektor-sektor pembangunan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah, memegang

peran kunci sebagai penentu peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pemerintahan.

- Semakin tinggi capaian kinerja daerah dalam urusan pemerintahan konkuren, maka akan semakin baik pula kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya akan berkontribusi terhadap capaian peningkatan indeks-indeks pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Dengan semangat introspeksi dan demi perbaikan ke depan, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pada masa Pandemi Covid-19.

Pertama, perlunya merubah paradigma pemerintahan dan pembangunan yang masih berorientasi pada *business as usual* atau rutinitas menjadi berbasis inovasi dan teknologi informasi dengan memanfaatkan modal budaya, SDM unggul, SDA, teknologi informasi, dan kearifan lokal sesuai karakteristik daerah masing-masing.

Kedua, pentingnya sinergi dan koordinasi pemerintahan secara kolaboratif baik antar daerah, antara pusat dengan daerah, antara pemerintah dengan swasta, dan

kapitalisasi modal sosial secara gotong royong yang akan menjadi salah satu kekuatan daya tahan ekonomi dan sosial masyarakat.

Ketiga, pemetaan masalah dan kapasitas pemerintah daerah berbasis data sebagai dasar pembuatan kebijakan. Pandemi Covid-19 menjadi contoh pentingnya ketersediaan, kelengkapan dan akses data bagi respon cepat Pemerintah dan Pemda dalam menghadapi krisis. Proses digitalisasi di seluruh aspek layanan pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana kerangka *open government* di tingkat Daerah semakin relevan. Pendekatan triangulasi kepentingan antara Pemerintah dan Pemda, sektor swasta, dan masyarakat, perlu diperkuat sebagai bagian dari tahapan dari transformasi kapasitas pemerintahan daerah.

Keempat, penguatan otonomi daerah dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Sinergi antara binwas (pembinaan dan pengawasan) umum oleh Kemendagri dengan binwas teknis oleh kementerian sektoral akan memberdayakan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Demikian pula binwas Daerah kabupaten/kota memerlukan peran

dan kewenangan yang jelas dan tegas dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Kelima, perbaikan pola penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kearah yang adaptif, inovatif, kolaboratif dan korektif. Hal ini dapat dilakukan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai mitra sejajar. Wujudkan harmonisasi melalui sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pengendalian urusan pemerintahan konkuren, yang berpedoman pada NSPK serta SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Tujuannya agar kualitas dan kuantitas layanan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Keenam, pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Organisasi perangkat daerah sebagai agen perubahan unsur pelaksana kebijakan perlu direviu, agar lebih sederhana, *agile* (lentur), inovatif, efektif dan efisien untuk melaksanakan kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren secara professional, transparan dan akuntabel.

Ketujuh, konsisten dalam implementasi deregulasi kebijakan. Sehubungan telah terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka penyesuaian

produk hukum terkait di daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai hierarki peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Hadirin yang saya hormati,

- Menutup sambutan ini, Saya minta seluruh jajaran Pemda sebagai ujung tombak pemerintahan agar selalu menjadi contoh dan pelopor, baik dalam berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik maupun dalam menegakkan protokol kesehatan serta menyukseskan program vaksinasi di seluruh Indonesia.
- "Selamat Hari Otonomi Daerah. Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19 untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah bangkit dan Indonesia Maju.
- Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dan seluruh tumpah darah Indonesia. Aamin YRA.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.